SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 500 / 179 TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TOYA WENING KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta Tahun 2025;

b. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025 memerlukan pengesahan Wali Kota;

c. bahwa pengesahan secara formal dalam produk hukum atas Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta diperlukan untuk menjamin kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat ...

Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penggunaan Laba Bersih Rp7.474.677.716 dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Laba Daerah	55%	Rp	4.111.072.744
Cadangan Umum	10%	Rp	747.467.772
Peningkatan 3 K	8%	Rp	597.974.217
Dana Kesejahteraan	7%	Rp	523.227.440
Peningkatan SDM	6%	Rp	448.480.663
Dana Sosial dan Lingkungan	5%	Rp	373.733.886

Tantiem...

Tantiem untuk Direksi & Dewas	4.5%	Rp	336.360.497
Bonus Pegawai	4.5%	Rp	336.360.497

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2026.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 500 / 179 TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TOYA WENING KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TOYA WENING KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

A. NERACA PER 31 DESEMBER 2025

NO	PERKIRAAN	JUMLAH	
I.	Aset		
	Aset Lancar		
	Kas dan Setara Kas	Rp	5.893.376.450
	Piutang Usaha	Rp	26.051.890.450
	Persediaan	Rp	4.123.538.618
	Biaya dibayar di Muka	Rp	100.823.228
	Aset Tidak Lancar		
	Aset Tetap	Rp	337.727.503.490
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(223.228.605.051)
	Aset Tetap Dalam Penyelesaian	Rp	10.219.215.174
	Simpanan Khusus	Rp	2.370.298.174
	Aset Lainnya	Rp	14.092.043.611
	Jumlah Aset	Rp	168.072.140.386
II.	Kewajiban Dan Ekuitas		
	Kewajiban Lancar		
	Hutang Usaha	Rp	3.550.931.279
	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	48.783.576
	Pendapatan Diterima di Muka	Rp	1.452.659.429
	Hutang Pajak	Rp	768.415.199
	Hutang Jangka Pendek Lainnya	Rp	1.157.729.412
	Kewajiban Tidak Lancar		
	Titipan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Rp	20.630.269.302

NO	PERKIRAAN	JUMLAH	
	Dana Pensiun Bersama (DAPENMA)	Rp	31.768.334.495
	Liabilitas RPKD	Rp	2.187.206.534
	Tabungan Wajib	Rp	3.347.656.074
	Cadangan Dana	Rp	1.857.000.700
	Jumlah Kewajiban	Rp	59.790.467.105
	Ekuitas		
	Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan	Rp	141.798.617.064
	Bantuan Pemerintah Pusat – Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Rp	44.846.010.550
	Kekayaan Aktiva Tanah	Rp	15.188.511.996
	Modal Hibah Pemerintah	Rp	8.508.779.515
	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	Rp	-
	Laba (Rugi) Ditahan	Rp	(75.943.984.149)
	Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp	7.474.677.716
	Keuntungan Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Rp	1.918.099.709
	Reklase Defisit Aktuaria dari Laba Ditahan	Rp	(37.703.591.553)
	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti (Aktuaria)	Rp	(4.783.966.461)
	Jumlah Ekuitas	Rp	101.303.154.386
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	168.072.140.386

B. LABA/RUGI PER 31 DESEMBER 2025

NO	PERKIRAAN	JUMLAH	
I.	Pendapatan Usaha		
	Pendapatan Air	Rp	71.530.679.900
	Pendapatan Non Air	Rp	4.455.425.986
	Pendapatan Air Limbah	Rp	9.937.170.071
	Jumlah	Rp	85.923.275.957
II.	Beban Langsung Usaha		
	Biaya Sumber Air	Rp	13.871.832.032
	Biaya Pengolahan Air	Rp	8.228.441.599
	Biaya Transmisi dan Distribusi	Rp	10.488.716.071

NO	PERKIRAAN	JUMLAH	
	Biaya Air Limbah	Rp	6.555.305.473
	Jumlah	Rp	39.144.295.175
III.	Beban Tidak Langsung Usaha		
	Biaya Pegawai	Rp	21.168.544.130
	Biaya Kantor	Rp	2.069.351.831
	Biaya Hubungan Langganan	Rp	1.644.998.705
	Biaya Penelitian dan Penggembangan	Rp	1.113.171.842
	Biaya Pemeliharaan	Rp	4.852.673.924
	Biaya Penyisihan dan Penghapusan Piutang	Rp	1.401.899.492
	Biaya Rupa-Rupa Biaya Umum	Rp	3.524.772.675
	Biaya Penyusutan Administrasi dan Umum	Rp	1.976.366.249
	Biaya Kantor Cabang	Rp	-
	Jumlah	Rp	37.751.778.848
	Laba (Rugi) Kotor Operasional	Rp	9.027.201.934
IV.	Pendapatan (Beban) Non Operasional		
	Pendapatan di Luar Usaha	Rp	2.626.339.148
	Beban di Luar Usaha	Rp	(1.550.234.245)
	Jumlah	Rp	1.076.104.903
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp	10.103.306.837
	Taksiran Biaya Pajak Penghasilan	Rp	2.628.629.122
	Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp	7.474.677.716

C. ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2025

NO	PERKIRAAN	JUMLAH	
I.	Arus Kas Dari Aktivasi Operasi		
	Penghasilan Sebelum Pajak	Rp	7.474.677.716
	Penyusutan Aset Tetap	Rp	9.307.944.171
	Piutang Usaha	Rp	28.643.170.559
	Piutang Lain-Lain	Rp	-
	Persediaan	Rp	412.008.799
	Biaya Dibayar di Muka	Rp	150.741.713
	Utang Usaha	Rp	(2.566.133.414)

NO	PERKIRAAN	JUMLAH	
	Beban Yang Masih Harus Dibayar	Rp	(583.492.555)
	Pendapatan Diterima di Muka	Rp	(1.204.391.918)
	Utang Pajak	Rp	768.415.199
	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	954.147.983
	Dana Pensiun Bersama (DAPENMA)	Rp	(6.077.142.158)
	Titipan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Rp	2.657.051.347
	Liabilitas RPKD	Rp	2.187.206.534
	Tabungan Wajib	Rp	(527.767.991)
	Cadangan Dana	Rp	1.372.912.180
	Jumlah	Rp	42.969.348.166
II.	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
	Perolehan Aset Tetap	Rp	(5.616.372.472)
	Penurunan Simpanan Khusus	Rp	1.505.125.891
	Jumlah	Rp	(4.111.246.581)
III.	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
	Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan		-
	Kenaikan Laba (Rugi) Ditahan	Rp	(30.171.782.590)
	Laba (Rugi) Tahun Lalu	Rp	(5.934.713.376)
	Jumlah	Rp	(40.890.462.428)
IV.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	Rp	(2.032.360.844)
V.	Kas dan Setara Kas Awal Tahun	Rp	7.925.737.291
VI.	Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	Rp	5.893.376.447

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO